



PENCERAHAN MASYARAKAT PETANI BAWANG AKAN SKEMA *FOOD ESTATE* SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN SDG'S DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Hermini Susiatiningsih*, Marten Hanura, Mohamad Rosyidin, Satwika Paramasatya, Palupi Anggraheni
Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Article Info

Keywords:
Food Estate, Sustainable
Development Goals, food security

ABSTRACT

[SOCIALIZATION OF SDG'S IMPLEMENTATION ON FOOD ESTATE SCHEME FOR ONION FARMERS IN TEMANGGUNG REGENCY] *Temanggung Regency is one of the areas in Central Java Province which has a strategic position geographically because it is passed by the Semarang-Purwokerto provincial route, connecting the Pantura road and the national road. The agricultural sector is the mainstay of Temanggung Regency to support the regional economy, mainly on the tobacco, coffee, garlic and vegetables. Based on data from the Ministry of Agriculture, Temanggung accounts for 21.17% of national onion production and is the largest garlic producer in Indonesia. Based on the geographical and economic potential, the Indonesian government encourages Temanggung as a location for the establishment of a food estate or food barn covering an area of 300 hectares to support the fulfillment of national food needs. The implementation of Food estate is expected to increase onion production and meet national food needs, as well as compete with imported commodities from other countries*

© 2022 JPV: Jurnal Pengabdian Vokasi Universitas Diponegoro

1. Pendahuluan

Kabupaten Temanggung mengandalkan pertanian untuk menopang ekonomi daerah. Dari segi geografis, Kabupaten Temanggung Sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, sehingga sering memiliki udara dingin. Kondisi wilayah demikian juga menjadi salah satu faktor 47,93% masyarakat Kabupaten Temanggung bekerja di sektor pertanian dan 41,19% bekerja di sektor manufaktur. Dari segi geografis, Kabupaten Temanggung Sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, sehingga sering memiliki udara dingin. Kondisi wilayah demikian juga menjadi salah satu faktor 47,93% masyarakat Kabupaten Temanggung bekerja di sektor pertanian dan 41,19% bekerja di sektor manufaktur [1]

Beberapa komoditi unggulan Temanggung antara lain tembakau, kopi, bawang, dan sayur mayur. Menurut data dari Pemerintah Kabupaten Temanggung, luas lahan pertanian yang terdapat di Temanggung mencapai 60.956 Ha. [2] Dari total luas lahan pertanian, sekitar 12.280 Ha di antaranya digunakan untuk menanam bawang putih. Pada tahun 2019 lalu, petani bawang di Temanggung berhasil memanen 88.817 ton bawang putih dan menyumbang sekitar 21,17% dari produksi bawang nasional. Hal ini mengukuhkan Kabupaten Temanggung sebagai produsen bawang putih terbesar di Indonesia. [3]. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga membentuk berbagai lembaga untuk mendukung kegiatan pertanian di Kabupaten Temanggung. Adapun beberapa lembaga tersebut adalah 20 unit

Balai Penyuluhan, 286 unit Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes), 289 unit Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), 1.865 unit Kelompok Tani, 3 unit Koperasi Tani, 71 unit Koperasi Serba Usaha, serta 14 Kelompok Usaha Bersama [4].

Meskipun Temanggung dikenal sebagai produsen bawang putih terbesar, berdasarkan informasi dari wawancara yang dilakukan oleh Tim Pengabdian terdapat permasalahan klasik dialami oleh petani bawang putih di Temanggung, yakni rendahnya harga bawang dan terpaan komoditas bawang putih impor saat musim panen. Sehingga diperlukan skema kebijakan yang dapat menstabilkan harga bawang putih nasional utamanya saat musim panen

Skema *food estate* atau lumbung pangan sendiri merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman dengan skala luas, atau lebih dari 25 Ha, dan dilakukan dengan konsep pertanian yang berbasis ilmu, organisasi, dan manajemen yang modern [5] Kebijakan dengan konsep ini pernah diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) atau Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke (PPETM). Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan 1,28 juta Ha yang digunakan untuk menanam tanaman pangan, tebu, dan kelapa sawit namun gagal mencapai target yang ditetapkan [6].

Pada tahun 2021, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan kembali mengembangkan program *food estate* salah satunya adalah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan pertimbangan beberapa faktor yakni : naiknya permintaan pangan, krisis pangan global, peningkatan alih fungsi lahan , penataan lahan untuk optimalisasi pangan di Pulau Jawa dan Bali serta strategi untuk meminimalisir impor komoditas pangan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas , fokus kegiatan pengabdian adalah memberikan informasi yang mumpuni kepada masyarakat petani bawang di Kabupaten Temanggung atas skema *food*

estate yang dijalankan Pemerintah Pusat dan keterkaitannya dengan upaya pemenuhan poin SDG's yakni perwujudan ketahanan pangan. Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah para petani bawang di Kabupaten Semarang. Adapun sasaran tersebut dipilih karena lokasi *food estate* di Kabupaten Temanggung merupakan lokasi pertanian bawang, sehingga para petani di Kabupaten Temanggung merupakan pihak yang paling terpengaruh dari skema *food estate*.

Kegiatan sosialisasi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para petani bawang di Kabupaten Temanggung yang menjadi sasaran kegiatan. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, diharapkan para kaum petani bawang mengetahui manfaat penerapan skema *food estate* serta pemenuhan nilai-nilai *Sustainable Development Goals*, khususnya pada pemenuhan ketahanan pangan. Para petani bawang di Kabupaten Temanggung juga diharapkan untuk mampu beradaptasi dan menerapkan skema *food estate* guna mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar.

Adapun tujuan dari kegiatan Pencerahan Masyarakat Petani Bawang, khususnya atas skema *Food Estate* sebagai Upaya Pemenuhan SDG's adalah peningkatan mutu kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan penerapan hasil penelitian yang dapat mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial di masyarakat. Sementara itu, tujuan khusus dari kegiatan ini adalah: (a) Melakukan edukasi terkait skema *food estate* dan *Sustainable Development Goals* untuk mewujudkan ketahanan pangan kepada para petani bawang terkhusus di daerah Kabupaten Temanggung (b) Membangun keahlian dan kreativitas petani bawang di Kabupaten Temanggung dalam penerapan skema *food estate* sehingga mampu mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat.

Food Security, Zero Hunger dan Kebijakan Food Estate

Penerapan *food estate* secara tidak langsung merupakan salah satu upaya pemenuhan cita-cita yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya cita-cita *Zero Hunger*. Cita-cita atau tujuan kedua dalam SDGs ini berusaha untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta menyediakan nutrisi yang lebih baik secara global, serta mendukung penerapan pertanian secara berkelanjutan (UN). Berdasarkan data dari PBB, pada tahun 2020, sekitar 2,37 milyar warga dunia tidak mampu mendapatkan makanan dengan nutrisi yang baik secara rutin. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 650 juta orang [7]. Selain itu, FAO menemukan bahwa pada tahun 2020, sekitar 12 persen populasi dunia tidak memiliki ketahanan pangan. Jumlah tersebut setara dengan 928 juta orang, meningkat sebanyak 148 juta orang dari tahun 2019. [8]

Tujuan *Zero Hunger* sendiri menargetkan pada tahun 2030 untuk mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan pangan yang aman, bernutrisi, dan berkecukupan sepanjang tahun. Selain itu, tujuan ini juga menargetkan pada tahun 2030 untuk memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dengan menerapkan metode yang dapat meningkatkan produktivitas dan menjaga ekosistem [7, p. 50]

Selain cita-cita SDGs, jaminan bagi masyarakat dunia untuk mendapatkan akses terhadap pangan yang layak dan bernutrisi juga terkandung dalam konsep *human security*, khususnya *food security* (Ketahanan Pangan). Dalam *World Food Summit* atau Konferensi Pangan Dunia di tahun 1996, *food security* didefinisikan sebagai suatu kondisi yang terjadi ketika seluruh warga dunia mendapatkan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bernutrisi setiap saat, guna menjalani kehidupan yang sehat (FAO, 2006). [9]

Untuk mencapai *food security*, terdapat beberapa faktor yang harus terpenuhi, yaitu

- a. *Food availability* (Ketersediaan pangan): Ketersediaan pangan berarti setiap negara memiliki cadangan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan nasional, baik itu dipasok dari produksi domestik maupun melalui impor
- b. *Food access* (Akses pangan): Akses pangan berarti seluruh warga dunia memiliki akses terhadap sumber pangan yang cukup dan bernutrisi.
- c. *Utilization* (Penataan): Ketersediaan dan akses pangan juga harus diimbangi dengan pola makan yang sehat, air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan yang memadai, sehingga seluruh masyarakat dapat mendapatkan nutrisi dan kesehatan yang layak.
- d. *Stability*: Ketersediaan dan akses pangan harus dimiliki oleh setiap warga dunia setiap saat, tanpa adanya kemungkinan hilangnya akses tersebut karena krisis ekonomi, krisis iklim, maupun kondisi tidak terduga lainnya.

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dan cita-cita yang terkandung dalam poin kedua SDGs sejalan dengan tujuan pelaksanaan skema *food estate* di Indonesia. Skema tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi *food security* dan kebutuhan pangan nasional, serta meningkatkan produksi bahan pangan berkualitas yang kemudian dapat diekspor dan membantu mengatasi kebutuhan pangan dunia.

Agenda Sustainable Development Goals (SDG's) dan Potensi Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Temanggung

Keterkaitan kegiatan pengabdian masyarakat ini bagi Departemen Hubungan Internasional secara khusus dan studi Hubungan Internasional secara umum adalah bahwa seluruh poin Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kerangka kerja internasional yang harus dipenuhi guna mencapai usaha perdamaian

dunia. Hal ini secara tidak langsung menjadi tanggung jawab akademisi HI untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemenuhan poin-poin SDGs dapat dilakukan melalui beberapa hal, salah satunya adalah pertanian dan skema food estate.

Hal ini diharapkan dapat mendorong para petani bawang di Kabupaten Temanggung untuk turut serta dalam menerapkan skema *food estate*. Selain itu, keterkaitan kegiatan ini dengan masyarakat adalah setelah adanya pengabdian ini diharapkan generasi milenial dapat menyadari bahwa keberhasilan penerapan skema *food estate* dan nilai SDGs selain dapat mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat juga dapat membantu membawa nama dan nilai-nilai lokal dari Kabupaten Temanggung ke ranah global.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dirancang sebagai upaya memberikan sosialisasi untuk memberikan pencerahan kepada para petani bawang di Kabupaten Temanggung terkait skema *food estate*. Obyek pengabdian adalah kelompok petani bawang di Kabupaten Temanggung. Identifikasi permasalahan obyek pengabdian yakni fluktuasi harga komoditas bawang saat panen dan usaha untuk meningkatkan produksi bawang dalam skema *food estate*. Metode penyelesaian masalah adalah fokus diskusi kelompok yang menghadirkan *stakeholders* yang terlibat untuk menciptakan kerjasama *Pentahelix* (masyarakat, pemerintah, akademisi, sektor bisnis dan media).

Kegiatan pengabdian ini akan dibagi ke dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I: Tim Pengabdian Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Diponegoro melakukan pemetaan kondisi di Kabupaten Semarang sebagai salah satu wilayah yang menjadi lokasi penerapan skema food estate.
- b. Tahap II: Tim Pengabdian Departemen Hubungan Internasional FISIP

Universitas Diponegoro melakukan kegiatan pengabdian berupa sosialisasi guna memberikan pencerahan kepada para petani bawang di Kabupaten Temanggung terkait skema food estate.

- c. Tahap III: Tim Pengabdian Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Diponegoro melakukan evaluasi guna melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dari program pengabdian pada masyarakat yang telah dijalankan.
- d. Tahap IV: Tim Pengabdian Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Diponegoro melanjutkan program pengabdian masyarakat sesuai dengan hasil evaluasi program.

Rancangan Evaluasi

Evaluasi dalam kegiatan ini bertujuan melihat keefektifan dari program pengabdian pada masyarakat ini dan hal-hal yang harus diperbaiki untuk keberlanjutan program. Evaluasi kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Kegiatan ini dapat dikatakan berhasil dengan indikator sebagai berikut:

- a. Terlaksananya program dengan materi yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Peningkatan pemahaman para petani bawang di Kabupaten Temanggung akan pentingnya pemenuhan nilai-nilai SDGs.
- c. Peningkatan motivasi dan semangat para petani bawang di Kabupaten Temanggung untuk turut serta menerapkan skema *food estate*.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian ini dilakukan dengan survei lokasi atau pemetaan kondisi Kabupaten Temanggung. Survei tersebut menghasilkan bahwa terdapat beberapa petani bawang di daerah tersebut yang cocok untuk mengikuti pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada 21 Mei 2022 di Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Kecamatan Parakan, Kabupaten

Temanggung. Selain diikuti oleh perwakilan dari kelompok petani bawang, pengabdian juga diikuti oleh perwakilan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat.

Pelaksanaan kegiatan selanjutnya dilakukan dengan sosialisasi skema *food estate* dan memberikan pemahaman bagaimana nilai tersebut dapat mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat. Kegiatan pemberian materi difokuskan pada pendekatan pengembangan kawasan yang menitikberatkan pada integrasi sektor dan subsektor, utamanya pada pendekatan berbasis lingkungan yang berkelanjutan dan berorientasi pemberdayaan masyarakat lokal.

Materi kemudian berfokus pada bagaimana peluang skema *food estate* dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama petani, khususnya petani bawang putih. Skema *food estate* dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM pertanian khususnya dalam pengelolaan bisnis. Oleh karena itu diperlukan usaha bersama untuk meningkatkan nilai jual komoditas unggulan untuk menambah nilai tambah produksi.



Gambar 1: Pemberian Materi oleh Tim Pengabdian

Selanjutnya, penggunaan teknologi, termasuk teknik pemasaran online maupun pemanfaatan teknologi dan informasi diperlukan untuk mengoptimalkan keuntungan bisnis petani. Ketika petani sudah mampu mengidentifikasi keuntungan skema *food estate* dan menyusun bentuk pengembangan bisnis yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi manfaat yang bisa diraih

apabila para petani bawang mengikuti skema *food estate*, yakni: (a) Pemasaran yang lebih terorganisir (b) pengembangan cakupan usaha petani dari hulu ke hilir (c) Membuka peluang investasi, kemitraan, modal untuk memajukan pertanian (d) mendukung peningkatan kualitas hasil pertanian yang berorientasi ekspor.

Dalam pembahasan skema *food estate*, Tim Pengabdian FISIP UNDIP kemudian menjelaskan mengenai SDGs, *food security*, serta peran Indonesia dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya. SDGs bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bagi setiap penduduk dunia, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Tujuan *Zero Hunger* sendiri menargetkan pada tahun 2030 untuk mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan pangan yang aman, bernutrisi, dan berkecukupan sepanjang tahun. dan bernutrisi setiap saat, guna menjalani kehidupan yang sehat [9]

Setelah sesi penyampaian materi berakhir, Tim UNDIP mengarahkan diskusi dengan sesi tanya jawab dan tukar pendapat mengenai skema *food estate* dan penerapannya dalam kegiatan pertanian bawang di Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan sesi diskusi dilanjutkan dengan *sharing* dari pihak petani bawang terkait realisasi pelaksanaan skema *food estate* di Kabupaten Temanggung. Dari hasil diskusi dengan perwakilan masyarakat petani bawang maupun perwakilan Dinas Pertanian ditemukan beberapa informasi utamanya dari pemetaan kekuatan maupun kelemahan komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung (bawang putih dan kopi). Hal ini menjadi topik diskusi menarik mengingat, petani selaku sasaran pengabdian membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun akademisi dan sektor bisnis apabila diproyeksikan mengikuti skema *food estate* yang berorientasi pada ketahanan pangan.



Gambar 2: Kegiatan Sesi Tanya Jawab

Pada sesi tanya jawab dan wawancara terpisah dengan perwakilan Dinas terkait terdapat beberapa informasi yang memberikan gambaran utuh tentang kondisi petani dalam mengikuti skema *food estate*. Beberapa informasi tersebut diantaranya : (1) Tantangan produktivitas komoditas unggulan membutuhkan strategi pemasaran yang lebih tepat guna (2) Dibutuhkan koordinasi yang lebih baik dengan Pemerintah Pusat khususnya tentang telaah kebijakan impor yang seringkali terjadi saat musim panen bawang (3) Petani membutuhkan pendampingan terkait seperti pendampingan paska panen, pemasaran, *cashflow* dan literasi keuangan dan produk perbankan untuk menciptakan produk komoditas unggulan yang dapat mengamankan ketersediaan suplai nasional bahkan berorientasi ekspor (4) Biaya produksi petani semakin tinggi (tenaga kerja, pupuk pestisida, benih). Ketersediaan pupuk dan benih bawang sangat terbatas dan harganya seringkali tidak terjangkau petani (5) Permasalahan perubahan iklim juga berdampak tidak hanya pada kualitas produk namun juga pada daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit

Dari hasil diskusi bersama kelompok petani ditemukan informasi bahwa Hasil panen bawang di area *food estate* pada tahun 2021 sebelumnya berjumlah 12,5 ton per hektare. Jumlah ini kemudian meningkat pada panen bawang pada Januari 2022 lalu yang mencapai 15,7 hektare. Meskipun para petani bawang menyampaikan bahwa dengan

melalui skema *food estate* para petani sudah mendapat jaminan pembeli untuk produk yang dipanen, tetapi para petani bawang di Kabupaten Temanggung terus mengharapkan dukungan serta bantuan pemerintah yang terus berjalan dengan stabil agar hasil skema *food estate* dapat menjadi hasil jangka panjang.

4. Kesimpulan

Identifikasi permasalahan untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan di sektor komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung yakni bawang putih adalah peningkatan produktivitas. Produktivitas petani bawang putih yang berpartisipasi di skema *food estate* dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat tentang regulasi impor, dan dibutuhkannya pendampingan paska panen. Untuk mengoptimalkan ketahanan pangan sebagai penerapan poin SDG's dalam skema *food estate*, partisipasi petani bawang di Kabupaten Temanggung membutuhkan dukungan kerjasama *stakeholders* lintas sektor (Pentahelix) yakni masyarakat, akademisi, sektor privat, pemerintah dan media.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada kelompok petani Bawang Kabupaten Temanggung, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Temanggung, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro

Daftar Pustaka

- [1] BPS, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung," 04 09 2019. [Online]. Available: <https://temanggungkab.bps.go.id/publication/download..> [Accessed 16 01 2022].
- [2] Pemkab Temanggung. [Online]. Available: <https://laman.temanggungkab.go.id/>

- info/detail/4/49/pertanian.html#:~:text=Kabupaten%20Temanggung%20merupakan%20daerah%20agraris,1.000%20%20E2%80%93%203.100%20mm%20Ftahun.. [Accessed 15 Januari 2022].
- [3] Kementan, "Mentan STL Panen Bawang Putih di Temanggung, Produk Lokal Lebih Sedap," [Online]. Available: <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4317>. [Accessed 15 Januari 2022].
- [4] DKPP Kabupaten Temanggung, "Profil Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2021," 2021. [Online]. Available: <https://dkppp.temanggungkab.go.id/home/halaman/177>.
- [5] Kementan, "Buku Pintar Food Estate," Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- [6] G. McDonald and S. Meylinah, "If at First You Do Not Succeed - An Overview of Indonesia's Food Estate Project," United States Department of Agriculture: Foreign Agriculture Service, Jakarta, 2021.
- [7] U. Nations, "The Sustainable Development Goals Report," New York, 2021.
- [8] FAO, "The State of Food Security and Nutrition in the World 2021," FAO, 2021.
- [9] FAO, "Policy Brief: Food Security," Food and Agriculture Organization, 2006.
- [10] Pemkab Bangka Selatan, "Apa Itu Food Estate?," 16 April 2021. [Online]. Available: [/post/detail/1110-apa-itu-food-estate](https://dppp.bangkaselatankab.go.id/post/detail/1110-apa-itu-food-estate). [Accessed 15 Januari 2022].
- [11] FAO, "Food Security Policy Brief: Food Security. Food and Agriculture," 06 2006. [Online]. Available: https://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitally/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf. [Accessed 16 01 2022].
- [12] Dindukcapil Kabupaten Temanggung, "Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Temanggung," Temanggung, 2021.

* *Corresponding author:*
h32minis22@gmail.com